

KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT M. UMER CHAPRA

Junaidi

Dosen Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Indragiri
junaidi@unisi.ac.id

Nisa Us Soleha

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah
Universitas Islam Indragiri

ABSTRAK

Konsep negara kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang diinginkan oleh seluruh umat manusia, seperti kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran dan keadilan. Umer Chapra mengungkapkan kesejahteraan sejatinya dalam Islam tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, tetapi menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam satu cara yang seimbang. Konsep negara kesejahteraan ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini berusaha mencampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Namun, menurut Chapra, konsep negara kesejahteraan memiliki kelemahan dalam regulasi, nasionalisasi, gerakan serikat buruh, kebijakan fiskal,

pertumbuhan yang tinggi dan kesempatan kerja Penuh. Keenam aspek tersebut merupakan kebutuhan material, sedangkan manusia tidak hanya bergantung dengan kebutuhan itu saja.

Kata Kunci
Negara
Kesejahteraan,
Ekonomi Islam,
Umar Chapra

Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat tujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai ajaran normatif, Islam memiliki peran sebagai pandangan hidup bagi seluruh penganutnya. Oleh karenanya, Islam tentu saja memiliki suatu konsep tersendiri yang bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan yang seimbang antara kepentingan duniawi maupun ukhrowi.¹

Salah satu acuan kesejahteraan secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi.² Tindakan individu dalam perekonomian secara khusus, maupun tindakan dalam bidang lainnya secara umum, sangat tergantung kepada pola pikir dan pandangan alam (*worldview*) individu tersebut.³ Maka Islam sebagai agama yang universal telah mengatur dan memberikan pola tindakan yang benar dalam menjalankan kehidupan, baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Akan tetapi, masyarakat dunia hari ini telah teracuni oleh *worldview* Barat yang kapitalis dan imperialis. Tidak banyak yang memahami konsep kehidupan Islami dan tidak banyak pula yang memiliki *worldview* yang Islami.⁴

¹ Ariza Fuadi. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume V, No. 1 Juni 2015. h.19.

² Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 3.

³ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992). h. 4.

⁴ Anindya Aryu Inayati, *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Desember 2013. h. 2.

Pemikiran M. Umer Chapra dalam bidang ekonomi adalah perpaduan antara ilmu-ilmu tradisional, ilmu agama dan ilmu ekonomi modern. Pemikirannya didominasi oleh bidang perekonomian makro karena ia banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara. Di antara pemikirannya adalah mengenai konsep *falah*, *hayyah thayyibah* dan tantangan ekonomi umat Islam, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah yang lebih ditekankan kepada bank sentral dan kebijakan kebijakannya, serta konsep negara kesejahteraan menurut Islam. Sebagaimana ekonom muslim lainnya, Umer Chapra mengedepankan pentingnya moral bagi jalannya perekonomian yang adil dan sehat.

Umer Chapra merupakan salah satu ekonom kontemporer muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di Timur dan Barat. Umer Chapra menganut Mazhab Mainstream mengatakan, bahwa usaha pengembangan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan berharga yang telah dicapai oleh para ekonom konvensional sebelumnya, akan tetapi ambillah sesuatu yang bermanfaat darinya dan kemudian buanglah sesuatu yang tidak bermanfaat darinya, sehingga terjadi suatu proses transformasi keilmuan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariah.⁵

Umer Chapra dengan pengalamannya yang luas dalam pengajaran dan riset bidang ekonomi serta pemahamannya yang bagus tentang syariat Islam, mengajukan bahwa hanya Islam sebagai sistem alternatif yang paling tepat untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Melalui buku-bukunya, beliau memberikan rujukan yang kaya tentang konsep konsep ekonomi konvensional dan memberikan kajian kritis terhadapnya. Strategi yang ditawarkan beliau tampaknya lebih, hasil pemikiran beliau sebagai seorang guru besar ekonomi yang memahami nilai-nilai Islam. Pembahasan beliau sangat komprehensif, tidak hanya

⁵ Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 33.

membahas aspek teoritisnya saja, melainkan juga aspek aplikasinya sehingga gagasan-gagasannya cukup realistis untuk dioperasionalkan dalam kehidupan nyata.

Menurut M. Umer Chapra kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang diinginkan oleh seluruh umat manusia. Di dalam kesejahteraan terkandung kenikmatan hidup yang di inginkan oleh manusia di dunia, seperti kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran dan keadilan. Oleh karena itu, tidak heran jika semua manusia mengurus tenaga maupun pikirannya dalam mencapai sebuah kesejahteraan dari berbagai “petunjuk”. Dari sinilah, peradaban manusia lahir dengan berbagai ideologi-ideologi yang digunakan sebagai petunjuk, seperti kapitalis, sosialis dan negara kesejahteraan.⁶

Umer Chapra juga mengungkapkan kesejahteraan sejatinya menurut syariat Islam tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam satu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang harus memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketaqwaan kepada Allah kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat dan tiadanya kejahatan anomi (bunuh diri). Mengingat bahwa sumber-sumber daya itu langka, maka penekanan berlebihannya pada salah satu aspek akan menyebabkan pengabaian yang lain.

⁶ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*. alih bahasa Ikhwan Abidin Basri “*Islam dan Tantangan Ekonomi*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 7.

Sketsa Biografi Muhammad Umer Chapra

M. Umer Chapra adalah salah satu ekonom kontemporer muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di Timur dan Barat. Ia bekerja sebagai penasehat ekonomi senior pada *Monetary Agency*, Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 1995. Ia juga memiliki pengalaman mengajar dan meneliti di bidang ekonomi.¹⁴ Dia adalah seorang ekonom profesional dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Pada dirinya seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, dimana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain.

Nama M. Umer Chapra selalu melekat dengan sejumlah lembaga- lembaga riset akademik bergengsi. Beliau terkenal dengan kontribusinya mengenai perkembangan ekonomi Islam selama 3 dekade. Beliau sangat dihormati atas pandangan dan pendekatan ilmiahnya. Beliau mempunyai karangan 10 buku dan monograf 68 dokumen dan 9 tinjauan buku. Sebagian dari bukunya telah diterjemahkan ke sejumlah bahasa, termasuk Arab, Urdu, Turkey, Melayu, Indonesia, Bangla, Prancis, Jerman, Jepang, dan Spanyol.¹⁵

Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan Saudi Arabia. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra.¹⁶ Beliau adalah penasehat riset di Institut Pelatihan dan Riset Islam, *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* tentang *Islamic Development Bank (IDB)* di Jeddah. Sebelum posisi tersebut, ia bekerja di Agen Moneter Saudi Arabia (SAMA) di Riyadh selama hampir 35 tahun

¹⁴ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), h. 59.

¹⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 297.

¹⁶ Muhammad Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam Dari Mazhab Baqir as-Sadr hingga Mazhab Mainstream*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 152.

dan akhirnya mengundurkan diri sebagai penasehat ekonomi senior.

Umer Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama. Keluarganya ini berperan penting membentuk kepribadian Umer Chapra hingga menjadi seorang intelektual yang memiliki kepribadian yang baik. Hal lain yang membuat Umer Chapra tumbuh menjadi seorang ekonom muslim yang berkepribadian baik adalah keluarganya yang berekonomi cukup sehingga Umer Chapra mendapatkan pendidikan yang cukup baik. Umer Chapra menghabiskan masa kecilnya dengan keluarga di tanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Tidak mengherankan nilai-nilai yang ditransformasi keluarganya merasuk dengan baik dalam jiwa Umer Chapra, ketika berumur 16 tahun, Umer Chapra pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D (*Philosophy of Doctor*) dari Universitas Minnesota. Pada umurnya 29 tahun, Umer Chapra melepas masa bujangnya, menikah dengan Kairunnisa Jamal Mundia pada tahun 1962. Perkawinannya ini mempunyai empat orang anak yaitu Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman.¹⁷

Riwayat pendidikan M. Umer Chapra hingga umur 15 tahun beliau masih belajar di tanah kelahirannya. Kemudian, M. Umer Chapra meneruskan pendidikan S1 dan magisternya di Karachi Pakistan. Dalam karir akademiknya Umer Chapra dari kecil sudah memperlihatkan kecerdasan sehingga pada ujian mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihinya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah itu, beliau melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di University of Karachi dan memperoleh gelar B. Com.¹⁸ (*Bachelor of Business Administration*) pada tahun 1954 dan M. Com. / M.BA¹⁹ (*Master of Business*

¹⁷ *Ibid.*, h. 152.

¹⁸ Gelar sarjana untuk Administrasi Bisnis

¹⁹ Gelar master untuk Administrasi Bisnis

Administration) pada tahun 1956. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954, karir akademisnya terus menanjak hingga meraih gelar doktor di University of Minnesota Amerika Serikat tahun 1956. Pembimbingnya Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Umer Chapra adalah seorang yang baik hati dan mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangan akademis.

Semasa menjadi mahasiswa, beliau telah berusaha untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Tidak lama setelah kembalinya ke Pakistan dari Amerika Serikat pada tahun 1961, Umer Chapra bergabung dalam *Center Institute of Islamic Research* dan berkuat selama 2 tahun dan secara sistematis mengkaji gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam tradisi Islam yang menurut pandangannya, dapat memenuhi premis intelektual bagi sebuah sistem ekonomi yang sehat. Upaya ini yang kemudian ditingkatkan dan dimatangkan oleh kajian dan refleksinya yang mendalam, telah menghantarkan kepada bukunya yang berjudul, *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature* (London, 1970).

M. Umer Chapra telah menulis 12 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku, belum artikel lepas di berbagai jurnal dan media massa. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia. Buku pertamanya, "*Towards a Just Monetary System*", dikatakan oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, sebagai "Presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini" dalam *Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies*. Buku ini adalah salah satu pondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muslim modern.

Pengertian Negara Kesejahteraan

Pada awalnya, negara kesejahteraan merupakan konsep sosialisme karena mutlaknya peran negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Kemudian seiring dengan

persentuhannya dengan konsep kapitalisme, negara kesejahteraan lebih bersikap demokratis-liberal. Artinya, negara memang masih berperan besar dalam penyelenggaraan jaminan sosial, namun terjadi perpaduan antara peran negara dan swasta baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan berbagai skim jaminan sosial dan pelayanan sosial.²⁰

Secara etimologis, istilah negara kesejahteraan terdiri dari dua kata yaitu negara dan kesejahteraan. Negara didefinisikan sebagai sebuah lembaga dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol hubungan seseorang dan menghasilkan kekuasaan dalam masyarakat. Kesejahteraan berarti kemakmuran atau keselamatan. Negara kesejahteraan dilaksanakan pertama kali di Eropa dan Amerika Serikat. Program ini telah dilakukan untuk memperbaiki sistem ekonomi kapitalisme yang lebih mengasihi dan melindungi yang masyarakat berekonomi lemah sebagai akibat dari “kejahatan”. Namun, seiring berjalannya waktu, program negara kesejahteraan yang telah dilakukan oleh kapitalisme belum bekerja untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Kemiskinan dan ketidakadilan masih terjadi sampai sekarang. Ini terjadi sejak kesalahan sistem kapitalisme yang hanya terfokus pada peningkatan pembangunan ekonomi yang mengarah pada eksistensi negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Hal ini berbeda dari negara kesejahteraan Islam yang memberikan konsep yang komprehensif. Selain pengembangan materi, negara kesejahteraan Islam juga berfokus pada aspek material moral yang diikuti oleh peningkatan spiritual di mana kapitalisme tidak terfokus pada hal itu. Tindakan

²⁰ Eddy Kiswanto, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, No. 2 Vol. 9, November 2005, h. 98-99.

menghubungkan system ini terdiri dari peran negara dan agama sebagai aspek kontrol sosial untuk kesejahteraan manusia.²¹

Menurut M. Umer Chapra konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini berusaha menyampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya.²² Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran seimbang pemerintah dalam perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme, peran ini ditiadakan sebab keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh *invisible hand* dalam pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan 'regulasi yang tepat' dan pengeluaran untuk tujuan-tujuan kesejahteraan juga dimasukkan ke dalam konsep ini. Namun, yang terjadi justru pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan yang terlalu besar tanpa dibarengi dengan pengurangan pengeluaran sektor swasta dan pemerintah pada bidang-bidang lainnya, dan menimbulkan klaim berlebihan pada sumber-sumber daya dan menjadi bumerang bagi konsep ini.²³

Konsep kesejahteraan dalam Islam, menurut Chapra, dapat dikatakan tidak semata-mata "ukhrawi" atau "duniawi". Islam lebih menekankan pada orientasi spiritual dalam usaha-usaha material dan menciptakan keselarasan antara dorongan lahir dan batin individu maupun kelompok. Dengan demikian Islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dan material kehidupan manusia, sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannya sebagai tonggak kesejahteraan dan kebahagiaan ummat manusia.²⁴

²¹ Ariza Fuadi dan Purbayu Budi Santosa, *Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, No. 1 Vol. 12, Maret 2015, h. 1.

²² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*. alih bahasa Ikhwan Abidin Basri "Islam dan Tantangan Ekonomi"... h. 56.

²³ *Ibid.*, h. 60-61

²⁴ M. Umer Chapra, dkk, *Etika Ekonomi Politik: Elemen Strategis Pembangunan*, Terj. Ainur Rofiq Sophiaan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 28

Konsep negara kesejahteraan merupakan konsep yang masih menjadi perdebatan. Dalam perdebatan tersebut terdapat empat pemaknaan konsep negara kesejahteraan, antara lain konsep negara kesejahteraan dimaknai sebagai kekuatan negara yang ditujukan kepada kesejahteraan nasional, konsep negara kesejahteraan dimaknai sebagai penyamaran negara kolektivisme dengan mengarahkan pembelanjaan, negara kesejahteraan hanya awal dari fase absolutisme politik dan terakhir konsep negara kesejahteraan dimaknai sebagai cara memperhatikan keutamaan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Perdebatan ini tidak terlepas dari adanya tarik menarik antara ideologi sosialisme dan kapitalisme. Implikasinya negara kesejahteraan dapat juga disebut sebagai jalan tengah.²⁵

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspon oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan.²⁶

Menilik dari kegagalan sistem Kapitalis dan Sosialis, Chapra menegaskan, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara kesejahteraan adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi

²⁵ Muryanto Amin, *Konsep Negara Kesejahteraan Dari Waktu ke Waktu*, Jurnal POLITEIA, NO.2 Vol.3, Juli 2011, h. 111-112

²⁶ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*, Jurnal Sosial dan politik, No. 1 Vol. 2, Juli-Desember 2016, h. 109.

kebutuhan hidupnya.²⁷ Kesejahteraan individu dalam masyarakat Islam dapat terealisasi bila ada iklim yang cocok bagi pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup.²⁸ Oleh sebab itu, konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, pelayan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu, negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah, keranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan.²⁹

Chapra mengungkapkan kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang diinginkan oleh seluruh umat manusia. Di dalam kesejahteraan terkandung kenikmatan hidup yang diinginkan oleh manusia di dunia, seperti kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran dan keadilan. Oleh karena itu, tidak heran jika semua manusia menguras tenaga maupun pikirannya dalam mencapai sebuah kesejahteraan dari berbagai “petunjuk”. Dari sinilah, peradaban manusia lahir dengan berbagai ideologi-ideologi yang digunakan sebagai petunjuk, seperti kapitalis, sosialis dan negara kesejahteraan.³⁰

²⁷ Anindya Aryu. I, *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*, Jurnal Ekonomi Islam, No. 1 Vol. 2, Desember 2013, h. 13.

²⁸ M. Umer Chapra, dkk, *Etika Ekonomi Politik: Elemen Strategis Pembangunan....*h. 29-30.

²⁹ V. Hadiyono, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum politik dan Kekuasaan Vol. 1, No. 1, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020), h. 27.

³⁰ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*. alih bahasa Ikhwan Abidin Basri “*Islam dan Tantangan Ekonomi*”...h.7.

Beliau juga mengungkapkan kesejahteraan sejatinya menurut syariat Islam tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam satu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang harus memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketaqwaan kepada Allah kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat dan tiadanya kejahatan anomi (bunuh diri). Mengingat bahwa sumber-sumber daya itu langka, maka penekanan berlebihannya pada salah satu aspek akan menyebabkan pengabaian yang lain.³¹

Makna dari sejahtera harus diperjelas. Menurut Chapra, 'sejahtera' bukan berarti 'yang kaya' namun 'yang ideal' yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bilamana martabat batin dan moral masyarakat meningkat, kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan.

Kelemahan Konsep Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan perspektif Islam yaitu suatu kerangka berpikir tentang program kebijakan kesejahteraan umat dan egalitarisme dalam suatu negara sesuai prinsip-prinsip Islam. Chapra berpendapat *Islamic welfare state* merupakan suatu program kebijakan yang saling terkait antara bidang ekonomi

³¹ M. Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwān Abidin Basri "Masa Depan Ilmu Ekonomi"...h. 50.

dengan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara Islam untuk tujuan menciptakan kesejahteraan umat.³²

Dasar-dasar kesejahteraan sosial dalam Islam setidaknya meliputi:

1. Pengentasan kemiskinan (*eradicate poverty*) dan menciptakan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi;
2. Stabilitas nilai uang riil;
3. Penegakan hukum dan ketentraman;
4. Penyediaan jaminan sosial dan keadilan ekonomi (*economic justice*),
5. Jaminan sosial (*social security*) dan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan (*wealth*);
6. Jalinan hubungan internasional dan jaminan pertahanan nasional (*national justice*).³³

Walaupun memang negara kesejahteraan ini terdengar sangat ideal, namun sistem ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Strategi dan Kelemahan sistem negara sejahtera menurut Chapra dapat dilihat dari aspek-aspek di bawah ini:³⁴

1. Regulasi

Tidak ada keraguan bahwa regulasi perusahaan-perusahaan swasta penting bagi terjaminnya kompetisi, terpeliharanya tatanan dan standar, dan perlindungan hak-hak orang lain. Tetapi, regulasi menuntut kriteria yang disepakati oleh nilai-nilai kolektif, jika kriteria dan nilai itu tersedia atau secara universal tidak diakui, maka dalam masyarakat pluralis yang setiap orang

³² M. Umer Chapra, “*The Islamic Welfare State and Its Role in The Economy*” dalam Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.), *Reading Public Finance in Islam*, (Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 1415 H/1995 M), h. 71.

³³ *Ibid.*, h. 73.

³⁴ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri “*Islam dan Tantangan Ekonomi*”....h. 115.

mengedepankan kepentingan dirinya sendiri, negara menjadi sebuah papan netral bagi semua kelompok yang berkepentingan, dan segala aktivitasnya hanya akan menjadi sasaran tawar-menawar dan perlombaan politik. Sehingga regulasi apapun yang ditegakkan di bawah tekanan angin politik, niscaya akan cenderung melemah atau dihapuskan oleh perubahan politik.³⁵

2. Nasionalisasi

Gerakan nasionalisasi industri-industri utama juga telah kehilangan momentumnya, ini disebabkan bukan saja karena kemunduran umum kinerja industri-industri yang dinasionalisasi, tetapi juga karena besarnya subsidi yang diserap oleh industri-industri ini untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan kadang-kadang karena keterbatasan politik yang menahannya untuk mematok harga berdasarkan interaksi pasar.³⁶

3. Gerakan Serikat Buruh

Gerakan Serikat Buruh ini dianggap sebagai panacea (obat mujarab) untuk meningkatkan pendapatan kaum buruh, memperbaiki kondisi kerja, dan menyediakan mereka program keamanan ekonomi, kini telah kehilangan momentum sebagai akibat dari adanya inflasi dan pengangguran yang tinggi. Upah yang terus merosot dipandang sebagai penyebab inflasi karena desakan ongkos, kekakuan upah umumnya dipandang sebagai penyebab utama pengangguran. Sebagai konsekuensinya, gerakan antiserikat buruh meningkat di banyak negara industri dan serikat buruh terus mengalami kemunduran.³⁷

4. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan alat utama bagi negara kesejahteraan. Kebijakan fiskal meliputi penggunaan belanja pemerintah, perpajakan progresif, dan pinjaman untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Belanja pemerintah menjadi

³⁵ *Ibid.*, h. 115.

³⁶ *Ibid.*, h. 117.

³⁷ *Ibid.*, h. 118.

fungsi tradisional yang mana bukan hanya diakui oleh negara *laissez-faire* seperti untuk pertahanan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan ekonomi. Tetapi, juga bagi fungsi-fungsi negara kesejahteraan untuk mendorong pertumbuhan, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan yang lebih besar. Berdasarkan analisis Umer Chapra, bahwa kebijakan fiskal dalam sistem negara sejahtera memiliki kelemahan yang disebabkan sebagai berikut:³⁸

a. Tingkat pajak yang tinggi karena beban pengeluaran negara sejahtera lebih besar, sehingga ada perlawanan terhadap perpajakan;

b. Subsidi yang tidak merata

Di satu pihak, pengeluaran pemerintah, beban pajak, dan defisit meningkat sangat tajam. Namun, di pihak lain terjadi kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang justru ingin diturunkan oleh negara kesejahteraan.³⁹

c. Ketidakmerataan yang terus berjalan

Kenyataan yang pahit, meskipun adanya kenaikan belanja pemerintah dan perpajakan progresif, tetapi ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan tetap meningkat. Yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya.⁴⁰

5. Pertumbuhan yang Tinggi

Pertumbuhan yang tinggi hanya suatu perangkat alat negara kesejahteraan yang sepenuhnya seiring dengan keterbatasan untuk tidak membuat penilaian atau perbandingan interpersonal, karena itu diterima secara aklamasi. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan memperoleh momentum setelah perang dunia kedua dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, maka keyakinan kuat dipertaruhkan pada kemampuannya menuju suatu masyarakat tak berkelas. Kebijakan sosial telah menjadi “sebuah tambahan *ad hoc* pada pertumbuhan

³⁸ *Ibid.*, h. 122.

³⁹ *Ibid.*, h. 123.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 128.

ekonomi". Beberapa penasehat kebijakan yang terkenal menganggap bahwa pertumbuhan yang lebih cepat merupakan solusi bagi semua persoalan, baik oleh negara maju maupun negara berkembang.⁴¹ Dua dasawarsa dari pengalaman pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kekayaan yang kontinue telah terbukti gagal menghapuskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, dan mengurangi kesenjangan.⁴²

6. Kesempatan Kerja Penuh

Pengangguran masih menjadi persoalan yang belum dapat dipecahkan di negara-negara industri dalam sistem negara sejahtera. Hal yang lebih mencemaskan lagi adalah makin tingginya jumlah pemuda yang menganggur, sehingga menurunkan gengsi mereka, menghambat kepercayaan masa depannya, meningkatkan permusuhan terhadap masyarakat, dan merusak kapasitas personal mereka serta kontribusi sosialnya.

Selanjutnya, kebijakan negara dalam program kesejahteraan sosial sebagaimana negara-negara Barat belum komprehensif, karena program kebijakannya lebih menekankan pada pertimbangan kesejahteraan material belum pada yang bersifat spiritual.

Menilik dari aspek-aspek kelemahan sistem negara sejahtera, Umer Chapra menegaskan, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber

⁴¹ *Ibid.*, h. 128.

⁴² *Ibid.*, h. 129.

penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain zakat, penghasilan dari sumber alam, pemungutan pajak dan pinjaman.

Kesalahan Konsep Negara Kesejahteraan

Islam sebagai sebuah agama tidak hanya dipandang sebagai suatu doktrin semata, akan tetapi mencakup pandangan hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual atau sifat keduniawian dan keukhrowian. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada di atas keuntungan segelintir atau sekelompok orang yaitu sistem negara kesejahteraan Islami (*Islamic welfare state*). Sedangkan, konsep negara kesejahteraan Islam di Barat dan bahkan di negara muslim kurang begitu mendapatkan perhatian baik oleh para sarjana maupun para pemimpin Negara. Padahal sistem dalam ekonomi Islam bisa menjadi alternatif untuk mencapai kemakmuran secara merata. Negara sejahtera menurut Chapra bukanlah kapitalis ataupun sosialis, tetapi negara dengan konsep Islam dan kehidupan yang Islami.⁴³

Dengan mendasarkan pada ajaran Islam dan praktik pada masa kekhalifahan Islam, ada beberapa fungsi dari Negara bagi kesejahteraan ekonomi rakyat:

1. Negara berfungsi untuk menghapus kemiskinan dan menciptakan kondisi bagi tersedianya secara penuh lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Negara berfungsi untuk menciptakan stabilitas dalam nilai nyata atas mata uang.
3. Negara berfungsi untuk memelihara tegaknya hukum dan keteraturan.

⁴³ *Ibid.*, h. 418.

4. Negara berfungsi untuk menjamin terciptanya keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
5. Negara berfungsi untuk menyediakan jaminan sosial dan menciptakan keseimbangan distribusi penghasilan dan kekayaan masyarakat.
6. Negara berfungsi untuk mengharmonisasikan hubungan internasional dan menjamin ketahanan nasional.

Penulis menyimpulkan bahwa Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik. Konsep Islam mengenai negara kesejahteraan begitu komprehensif, negara kesejahteraan dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, sedangkan kesejahteraan ekonomi hanya sebagai lapisan. Tujuan-tujuan dari konsep Islam mengenai negara kesejahteraan bukan semata-mata bersifat materi, akan tetapi didasarkan pada konsep kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik sehingga memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi serta menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.

Kegagalan Konsep Negara Kesejahteraan

Terminologi *Welfare State* pertama kali digunakan di Inggris pada tahun 1941 untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan negara dan kebebasan individu. *Welfare State* atau yang lazim disebut sebagai negara sejahtera merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Akan tetapi apa yang menjadi tujuan ideal dari program *welfare state* ini tidaklah semulus yang diharapkan. Ketidakseimbangan ekonomi global, kemiskinan, pengangguran yang disertai dengan kejahatan telah melanda di hampir seluruh penjuru dunia. Konsep dan program negara kesejahteraan bisa

dibilang gagal dalam mengantarkan umat manusia ke arah terwujudnya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan.

Ideologi yang digunakan oleh dunia terdahulu ialah kapitalis, sosialis dan negara kesejahteraan. Ideologi tersebut telah direalisasikan dalam kehidupan, namun kenyataannya semua ideologi itu telah gagal menciptakan kesejahteraan manusia. Kegagalan ini dapat dikatakan karena kesejahteraan menurut paham kapitalisme hanya bersifat material semata. Sifat material ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi setiap individu, penghapusan kemiskinan, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil di antara seluruh rakyat. Sedangkan kesejahteraan spiritual tidaklah berada dalam konsep dari doktrin paham kapitalisme yang membawa pada ketenangan dan kebahagiaan hidup, serta kedamaian. Akibatnya, paham kapitalisme ini lebih mengedepankan tujuan duniawi semata dan tidak memikirkan dari tujuan ukhrawi.⁴⁴

Meskipun kapitalisme dianggap lebih unggul dalam hal kinerja ekonomi, tetapi pemenuhan kesejahteraan material bagi seluruh penduduknya belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dapat dilihat dari ketidakstabilan ekonomi dunia yang tercermin pada tingkat inflasi dan tingginya pengangguran di negara-negara maju penganut sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan tingginya kesenjangan sosial antara penduduk kaya dan miskin. Sementara itu, di negara-negara berkembang terjerat beban hutang luar negeri yang semakin mengakibatkan pembangunan di segala bidang terhambat karena teralokasi pada pembayaran beban hutang tersebut.⁴⁵

Menurut Chapra, kenyataannya para analis politik telah gagal mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima secara umum

⁴⁴ Ariza Fuadi. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme.....*, h. 3.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 4.

mengenai konsep negara kesejahteraan. Banyak contoh negara yang mengaplikasikan konsep negara kesejahteraan secara berbeda-beda. Misal versinya yang setengah-setengah di Amerika, sampai bentuk yang konkret di Swedia. Sementara di Inggris, konsep welfare state dipahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law*.⁴⁶

Oleh karena itu Islam memandang suatu negara merupakan sebuah instrumen dalam rangka untuk merealisasikan tujuan-tujuan pokok suatu negara. Melalui kedaulatan inilah tujuan-tujuan suatu negara tersebut dapat terealisasi. Akan tetapi Islam memandang bahwa kedaulatan tersebut tidaklah absolut. Apapun dan dalam bentuk apapun kedaulatan ini pada hakikatnya merupakan mutlak milik Allah Swt. Orientasi kedaulatan dalam sebuah negara haruslah sejalan dengan kehendak Tuhan, tidak boleh hanya menurut kehendak rakyat banyak. Kedaulatan ini diwujudkan dalam aturan-aturan Tuhan yang dinyatakan dalam Al-Qur'an pada surah Yusuf ayat 40 serta diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam Sunnah sebagai misi kenabian.⁴⁷

Sebagai agama, Islam telah menekankan secara komprehensif tentang nilai-nilai moral, sehingga sebuah negara Islam tidak dapat dilepaskan dari etika dalam bermasyarakat sebagai wujud yang responsif bahwa *Islamic Welfare State* menciptakan spirit moral-religius dan kesejahteraan warga.

Kesimpulan

Konsep negara kesejahteraan merupakan konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini berusaha menyampurkan kedua

⁴⁶ Rijal Assidiq Mulyana, *Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqashid Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1 No. 2, Desember 2017, h. 164.

⁴⁷ Ariza Fuadi. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme.....*, h. 19.

sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah, keranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan.

Menilik dari aspek-aspek kelemahan sistem negara sejahtera, kritik M. Umer Chapra terhadap Konsep Negara Kesejahteraan adalah mengenai makna dari sejahtera itu sendiri harus diperjelas. Chapra menegaskan, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Menurut Umer Chapra konsep Negara kesejahteraan memiliki kelemahan yang terdiri dari 6 aspek yaitu Regulasi, Nasionalisasi, Gerakan Serikat Buruh, Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan yang Tinggi dan Kesempatan Kerja Penuh. Beliau juga mengungkapkan kesejahteraan sejatinya menurut syariat Islam tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam satu cara yang seimbang.

| DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing.
- Amin, Muryanto, 2011. *Konsep Negara Kesejahteraan Dari Waktu ke Waktu*, Jurnal POLITEIA, No.2 Vol. 3
- Aryu Inayati, Anindya. *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Desember 2013.
- Assidiq Mulyana, Rijal. *Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqashid Syariah*, 2017. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1 No. 2
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and The Economic Challenge*, (United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought).
- _____. *Islam and The Economic Challenge*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. dkk, 1997. *Etika Ekonomi Politik: Elemen Strategis Pembangunan*, Terj. Ainur Rofiq Sophiaan, Surabaya: Risalah Gusti.
- Danupranata, Gita. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Faturrahman, Djamil. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: sejarah, teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuadi, Ariza. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume V, No. 1 Juni 2015.

- Fuadi, Ariza dan Purbayu Budi Santosa, 2015. *Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, No. 1 Vol. 12.
- Karim, Adiwarmman A. 2010. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kiswanto, Eddy, 2005. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, No. 2 Vol. 9
- Sholihin, Muhammad, 2013. *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam Dari Mazhab Baqir as-Sadr hingga Mazhab Mainstream*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- V. Hadiyono. 2020. *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Nomor 1.
- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: LPPI

